



Dari Demokrasi Ke Oligarki (Potret Partai Politik di Parlemen Era Reformasi)

Abdullah Ismail ^{1✉}, Amrul Djana ¹, Saiful Amir ² dan Muhammad Haji Noh ¹

¹ Program Studi Sosiolog, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia.

² Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia.

Email : abdullahismailx@gmail.com; amruldjana1@gmail.com; maitara0214@gmail.com; drsmnoh25@gmail.com.

Info Artikel :	<input type="checkbox"/> Artikel Penelitian	<input type="checkbox"/> Artikel Pengabdian	<input checked="" type="checkbox"/> Riview Artikel
Diterima : 26 Juni 2024, Disetujui : 30 Juni 2024, Publikasi On-Line : 30 Juni 2024			

Vol.	No.
4	1
Hal 47 - 52	

Peer-Reviewed

Keyword :

Demokrasi, Oligarki, Potret partai Politik, Parlemen Era Reformasi

Koresponden Author :

Abdullah Ismail

Email :
abdullahismailx@gmail.com
 Univ. Muhammadiyah
 Maluku Utara, Ternate,
 Indonesia



Copyright© 2024. Abdullah Ismail, Amrul Djana, Saiful Amir, Muhammad Haji Noh

Abstrak

Di era reformasi telah terjadi perubahan politik dari rezim otoriter menuju pemerintahan demokrasi antara lain ditandai dengan berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu). Tak ada demokrasi tanpa Pemilu. Tak ada Pemilu tanpa partai politik. Melalui Pemilu yang demokratis diharapkan dapat dihasilkan lembaga-lembaga demokrasi baru yang berisi para wakil rakyat yang pada akhirnya berpihak serta berjuang untuk kepentingan rakyat. Meskipun dalam kenyataannya, Pemilu yang berlangsung secara bebas dan demokratis tidak selalu menjamin lahirnya pemerintahan yang lebih bertanggung jawab kepada rakyatnya. Pada titik inilah, tulisan ini mencoba melihat bagaimana kecenderungan proses dari demokrasi ke oligarki di parlemen era reformasi sekarang ini. Dengan fokus bahasanya pada pengambilan kebijakan/keputusan dan konflik kepentingan, serta pengelolaan konflik sebagai watak demokrasi.

I. PENDAHULUAN

Era perubahan politik dari rezim otoriter menuju pemerintahan demokrasi antara lain ditandai dengan berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) yang relatif bebas, adil, jujur, dan demokrasi. Tak ada demokrasi tanpa pemilihan Umum (Pemilu). Tak ada Pemilihan Umum (Pemilu) tanpa partai politik. pemilihan umum (Pemilu) dan partai politik selalu menciptakan suasana ingar-bingar, gaduh, dan konflik, namun juga menyimpan harapan bagi kemajuan dan perbaikan sebuah negara dan bangsa.¹ Melalui pemilihan umum yang demokratis diharapkan dapat dihasilkan lembaga-lembaga demokrasi baru yang berisi para wakil rakyat yang pada akhirnya berpihak serta berjuang untuk kepentingan rakyat. Meskipun dalam kenyataannya, pemilihan umum yang berlangsung secara bebas dan

¹ Komaruddin Hidayat, *Politik Panjat Pinang : Di Mana Peran Agama?*, (Jakarta : Kompas, 2006) hal. 49.

demokratis tidak selalu menjamin lahirnya pemerintahan yang lebih bertanggung jawab kepada rakyatnya.

Pertanyaannya kemudian, apakah dengan kenyataan seperti ini lalu kemudian kita harus meninggalkan demokrasi? jawabnya tidak, karena secara historis-empiris sistem demokrasi dinilai unggul, bila dibandingkan dengan sistem lain. Keunggulan yang dimiliki demokrasi adalah adanya mekanisme kontrol dan partisipasi rakyat secara reguler, terlembagakan, dan terbuka melalui perwakilan yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Namun, demokrasi juga memiliki sisi kelemahan, seperti disampaikan di atas bahwa proses demokrasi tidak selalu melahirkan pemerintah yang pro pada rakyat dan atau lebih bertanggung jawab pada rakyatnya. Bagi sebuah masyarakat berpendidikan dan ekonominya telah maju, cacat demokrasi ini bisa diperkecil. Akan tetapi, bagi masyarakat Indonesia yang kondisi ekonomi maupun pendidikannya yang masih rendah, sekalipun demokrasi menjadi pilihan utama, sebaiknya jangan berharap demokrasi sebagai obat mujarab yang bisa segerah menyembuhkan keterpurukan bangsa yang sudah parah ini, mengingat demokrasi bukan sekedar prosedur, melainkan juga kultur.²

Rasa keprihatinan Komaruddin Hidayat ini sangat beralasan, hasil survei pertama (2003-2004) DEMOS tentang demokrasi di Indonesia yang berkaitan dengan instrumen demokrasi hampir semua instrumen (hak dan institusi) yang dinilai mendukung demokrasi telah 'dibajak' oleh kaum elit. Survei ini dengan jelas menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia hanya dikuasai oleh para elit-*oligarki*³, yang memiliki pengaruh kuat yang dominan terutama dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Kelompok elit ini tidak hanya menguasai perangkat demokrasi di tingkat negara, namun juga telah memonopoli dan memanipulasinya untuk kepentingan mereka sendiri, termasuk di tingkat lokal. Pada survei kedua (2007-2008) DEMOS hasilnya tampak mengalami perbaikan. Hal ini sekaligus mempersempit sekat (*gap*) defisit sehingga tampak makin kecil. Akan tetapi, secara umum, dasar-dasar demokrasi masih lemah. Ini berkaitan dengan masih langgengnya dominasi elit, lemahnya kemampuan politik rakyat dan mutu representasi yang masih tetap memburuk.⁴

Hasil survei DEMOS ini, dapat memberikan gambaran bahwa proses demokrasi di Indonesia sekarang ada kecenderungan mengarah ke oligarki. Di satu sisi demokrasi menentang oligarki, namun, di sisi lain demokrasi perwakilan justru memungkinkan oligarki tersebut lahir. Kecenderungan oligarki tersebut, dari hari ke hari semakin nyata bila partai-partai yang memerintah diperiksa dengan seksama.⁵ Olehnya, dari latar belakang di atas, maka tulisan ini mencoba melihat bagaimana kecenderungan proses dari demokrasi ke oligarki di parlemen era reformasi sekarang ini. Dengan fokus bahasannya pada pengambilan kebijakan/keputusan dan konflik kepentingan, serta pengelolaan konflik sebagai watak demokrasi.

II. PEMBAHASAN

2.1. Pengambilan Kebijakan/Keputusan dan Konflik Kepentingan

Winston Churchill, seorang pendekar demokrasi modern pernah menegaskan, bahwa memang demokrasi itu bentuk pemerintahan yang jelek, tetapi yang lebih baik tidak ada.

² *Ibid*, hal. 44.

³ Oligarki adalah secara sederhana bisa dimaknai sebagai kekuasaan berasal dari beberapa orang yang memiliki kelebihan khusus, bisa karena modal, kepandaian, keturunan atau kharisma. Oligarki (*oligarchy*) termasuk salah satu konsep yang paling banyak digunakan namun paling kurang dirumuskan dengan jelas dalam ilmu sosial. *International Encyclopedia of Social Sciences* mendefinisikan oligarki sebagai "bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil", dan menambahkan bahwa "oligarki berasal dari bahasa Yunani *oligarki* (pemerintah oleh yang sedikit), yang terdiri atas *oligopoli* (sedikit) dan *archein* (memerintah)". (Indridason 2008, dalam Jefferey A. Winters, *Oligarki*, 2011 (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama), hal 1-2.

⁴ Syata'atun Kariadi, *Blok Politik Demokratik, Panduan Pelatihan*, (Jakarta : Demos, 2009) hal 53 & 56.

⁵ Daniel Dhakidae, dalam Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan (eds.), *Partai-Partai Politik Indonesia : Ideologi dan Program, 2004-2009*, (Jakarta : Kompas, 2004) hal. 15.

Penegasan Churchill itu sebagai penanda, bahwa apa yang tengah berlangsung dalam negeri yang baru saja membuat perubahan mendasar dalam sistem politik, dengan lengsernya penguasa Orde Baru yang otoriter ke era baru yang dikenal dengan era reformasi. Kini dalam perjalanannya mulai menampakkan kejelekannya. Kisruh di tubuh politisi kita sering terjadi dan malah menampakkan wujud ketimpangan dalam mengambil keputusan yang menaifkan kepentingan rakyat.

Kasus Impor Beras, kenaikan BBM, dan lain-lain misalnya, telah memunculkan polemik di ruang publik yang merupakan pertarungan antara pihak negara, pemodal/pasar dan masyarakat. Perpecahan di tubuh parlemen dalam mengakumulasikan harapan antara tuntutan masyarakat dan negara (Pemerintah) menimbulkan konflik antar dua kubu di dalam lembaga tersebut. Dengan keberadaan konflik tersebut menandakan representasi perwakilan rakyat dalam tubuh parlemen terbelah karena konflik kepentingan, mau berpihak ke negara (Pemerintah) atau rakyat yang diwakilinya. Keadaan ini menunjukkan bahwa parlemen bukan lagi sebagai inspirator kepentingan rakyat melainkan sebagai fasilitator negara dalam pengambilan setiap kebijakan/keputusan.

Menurut Alfred de Grazia, dalam Arbi Sanit (1985), perwakilan politik diartikan sebagai hubungan di antara dua pihak yaitu wakil dan terwakili di mana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili. Dalam teori perwakilan, menurut Graham Hassal dan Cheryl Saunder (1997), ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu *free mandate theory* dan *imperative mandate theory*. Teori mandat pada prinsipnya menunjukkan bahwa wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakili dalam proses kehidupan politik. Oleh karena itu, wakil dituntut selalau memberikan pandangan, bersikap dan bertindak sejalan dengan mandat yang diperolehnya. Pandangan anggota legislatif secara pribadi tidak diperkenankan dipergunakan dalam kualifikasinya sebagai wakil yang memperoleh mandat rakyat. Sementara teori kebebasan, menjelaskan bahwa wakil dianggap perlu merumuskan sikap dan pandangannya tentang masalah yang dihadapi tanpa terikat secara ketat kepada terwakili atau rakyat. Tipe *imperative mandate theory* lebih cenderung menghendaki adanya aspek akuntabilitas dalam relasi wakil dan terwakili dibandingkan dengan teori kebebasan.⁶

Berangkat dari pemikiran di atas, maka kebijakan Pemerintah tentang impor Beras menunjukkan ketidakjelasan politik pangan pemerintah untuk mensejahterakan petani sekaligus hilangnya wujud keperpihakan pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya. Langkah pemerintah yang membuka masuknya beras dari luar negeri dengan mengizinkan import beras dari Vietnam sebanyak 70,500 ton mendapat penolakan keras dari beberapa fraksi Dewan Perwakilan Rakyat minus Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dari keterwakilan rakyat pada lembaga tersebut terjadi perbedaan dalam merumuskan keputusan untuk menglegalkan kebijakan pemerintah yang jelas-jelas merugikan kaum Petani pada umumnya.

Konflik kepentingan yang terjadi di tubuh parlemen/ DPR antara dua kubu yang pro rakyat dan pro pemerintah, telah dinilai banyak kalangan (dan tentu saja para pengamat politik) menimbulkan krisis konstitusi dan juga krisis demokrasi, yang ujung-ujungnya bermuara hanya pada soal rebutan kursi kekuasaan. Pada hal sama diketahui, dengan sistem politik yang ada sekarang menunjukkan negeri ini berada pada titik transisi demokrasi atau bisa dikatakan sebagai proses menuju konsolidasi demokrasi, maka sudah saatnya harus sesegera menata proses-proses pengambilan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, sebagai langkah pencegahan untuk tidak mengembalikan "watak" oligarki di parlemen.

⁶ Syamsuddin Haris (ed), *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi Di Indonesia*, (Jakarta : LIPI Press, 2007) hal. 7.

Konflik yang sementara mewarnai tubuh DPR, adalah pertarungan kepentingan elit, yakni soal rebutan kursi-kekuasaan. Yang mana ada sebagian fraksi yang mendukung kebijakan pemerintah dan sebagian fraksi yang mempertaruhkan demi kepentingan rakyat. Konsep ini didasarkan atas bahwa di dalam kelompok penguasa (*the ruling class*) selain ada elit yang berkuasa (*the ruling elite*) juga ada elit tandingan, yang mampu meraih kekuasaan melalui massa jika elit yang berkuasa kehilangan kemampuannya untuk memerintah. Sebagaimana Vilfredo Pareto (1848-1923), menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat, elit yang memerintah mencoba menemukan basis moral dan hukum bagi keberadaannya dalam benteng kekuasaan serta mewakilinya sebagai "konsekuensi yang perlu dan logis atas doktrin-doktrin dan kepercayaan-kepercayaan yang secara umum telah dikenal dan diterima."⁷

Kebijakan pemerintah dalam hal impor beras menunjukkan suatu wujud penampakan kelompok elit yang berkuasa meruntuhkan kelompok marginal yang selalu direpresentasikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, Lemahnya lembaga keterwakilan rakyat menandakan aspirasi dan inspirasi kelas bawah tidak pernah tertuang menjadi kebijakan publik, Yang dikhawatirkan justru tampilnya watak oligarki, seperti apa yang disebutkan Roberto Michels, dalam S.P.Varma (2003), sebagai *iron law of oligarchy* atau hukum besi oligarki yang dinyatakannya sebagai satu dari banyak hukum besi dalam sejarah, di mana sebagian besar masyarakat demokratis modern, dan dalam masyarakat itu sendiri, serta partai-partai yang sudah demikian berkembang tak lagi dapat melepaskan diri darinya. Faktor utama yang mendukung hukum ini menurut Michels adalah unsur organisasi. Pemimpin-pemimpin dengan mudah mengambil keuntungan dari kualitas-kualitas tersebut untuk melestarikan posisi kekuasaan mereka. Indikasi ke arah ini mulai muncul, di pimpinan komisi dan badan dalam tubuh parlemen.

Pada titik inilah kemudian muncul persoalan-persoalan berkaitan dengan demokrasi, bahwa representasi Politik sering kali mengalami bias elit atau diistilahkan gejala oligarki. Hanya berlandung dibalik representasi, demokrasi tidak ayal/lambat dituduh politik yang elitis, di mana representasi berarti membatasi aspirasi rakyat secara massif, yang membuka peluang bagi permainan elit, tanpa ada kontrol publik secara terbuka.⁸ Proses demokratis ada dalam situasi kompetitif, terbuka bagi keinginan publik, dengan apa individu-individu mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan-keputusan. Sekarang kita diperhadapkan dengan berita-berita tentang kasus Bank Century yang merugikan negara sebesar Rp. 6,7 triliun yang sementara ditangani oleh Pansus Angket Century di DPR. Haruskah Pansus Century tersandra oleh kekuatan-kekuatan oligarki? jawabannya bola salju Century masih masih berputar, semoga kemenangan kembali diraih oleh rakyat!

2.2. Pengelolaan Konflik Sebagai Kerangka Demokrasi

Dalam pertarungan politik, termasuk perebutan kekuasaan, konflik tidak mungkin dihindari, demikian adagium yang berlaku dalam "rimba" perpolitikan. Namun, sejauh mana konflik itu dapat dikelola secara dewasa oleh anggota parlemen dan menghasilkan demokrasi yang modern dan bermartabat, itulah yang patut dicermati. Secara sosiologis, inti tesis konflik adalah distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Pertentangan itu terjadi dalam situasi di mana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan *status quo* sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Ada dua kelompok yang terlibat dalam konflik, yakni kelompok semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Tentang ini, Dahrendorf berpendapat, bahwa konsep-konsep seperti

⁷ Vilfredo Pareto, dalam S. P. Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta : Rajawali Press, 2003)

⁸ Heru Nugroho, *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001) hal. 88.

kepentingan nyata dan kepentingan laten, kelompok kepentingan dan kelompok semu, posisi dan wewenang merupakan unsur-unsur dasar untuk dapat menerangkan bentuk-bentuk dari konflik.⁹

Konflik untuk sebagian ahli ilmu politik juga diyakini sebagai inti demokrasi. Konflik elit sebenarnya adalah hal lumrah. Bahkan, lebih dari itu, konflik elit bisa bermanfaat dalam rangka membina kehidupan politik dan pemerintahan yang lebih baik. Konflik juga mengandung peluang-peluang yang sangat berharga dalam rangka demokratisasi, khususnya dalam rangka konsolidasi atau pemantapan lembaga dan mekanisme demokrasi yang memang masih berusia muda.

Sejalan dengan itu, Alfian menegaskan bahwa esensi demokrasi adalah kemampuan untuk menciptakan suatu mekanisme politik yang dapat menjaga keseimbangan yang wajar antara konsensus dan konflik. Ini mengartikan, bahwa demokrasi merupakan satu bentuk pengelolaan konflik dan konsensus. Konflik tetap ditenggang tapi sejauh tidak membahayakan masyarakat dan sistem politik secara umum. Dengan demikian, Alfian memandang manajemen konflik dan konsensus politik sebagai hakikat atau inti dari demokrasi.¹⁰

Watak yang ditampilkan anggota parlemen dalam fenomena import beras, menunjukkan legalitas lembaga tersebut kehilangan "roh" demokrasi, karena yang dipertontonkan, menurut Eep Saefullah, adalah pertarungan kekuasaan yang lebih mengedepankan demokrasi elitis, ketimbang demokrasi populis serta mengabaikan hak-hak publik. Begitu mudah anggota DPR "mengabaikan" rakyat ketika kekuasaan telah digenggamnya. Tak ada sikap demokratis dan mau berdamai untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan yang lebih besar. Perebutan mendukung kebijakan pemerintah dalam hal tersebut seakan-akan merebutkan sesuatu "mata air" menjadi patokan, bagaimana anggota DPR lebih bersemangat mengurus kepentingannya. Yang dapat menjadi ancaman bagi demokrasi di negeri ini adalah tampilnya, apa yang diungkapkan Eep Syaefullah dengan "*pesta oligarki*" (untuk kepentingan pribadi, kelompok atau parpol dan persiapan pemilu berikutnya), bukan "*pesta demokrasi*."¹¹

III. PENUTUP

Proses demokrasi yang terjadi saat ini, semakin mengarah pada perkembangan demokrasi yang telah berubah menjadi demokrasi elitis-oligarki yang terkonsolidasi dan memburuknya persoalan politik representasi/perwakilan. Akibatnya bisa kita amati dalam pengambilan kebijakan politik yang sering diuntungkan negara (pemerintah), sedangkan rakyat selalu berada pada posisi termarginalisasi.

Sementara itu, Vedi R. Hadiz, dalam Jurnal Wacana Edisi 18. Tahun VI/2004, terinspirasi oleh diktum Gramscian, "*sementara orde tua sudah ambruk, struktur baru tidak bisa dilahirkan*". Tidak terbentuknya struktur yang baru ini dikarenakan tidak adanya basis yang dibutuhkan untuk aliansi dua pilar dalam proses demokrasi, yakni partai liberal yang mengusung kepentingan kelas menengah, dan partai buruh yang mengusung kepentingan buruh, petani, nelayan dan kaum marjinal dalam perubahan sosial dan ekonomi. Tidak adanya dua basis sosial dalam parpol tersebut terjadi, menurut analisisnya, karena semua partai masih berbasis pada etnisitas dan religioisitas serta tergantung pada pendanaan oligarki. Dampak dari formulasi politik semacam itu dalam proses reformasi adalah banyak struktur patronase dan oligarki yang bertahan mentereng. Reformasi hanya menggeser mereka dari membangun relasi-gelap melalui birokrasi ke partai politik dan nasional, regional dan nasional.¹²

⁹ Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam masyarakat Industri : Sebuah Analisa Kritis*, (terjemahan, Jakarta : Rajawali Press, 1986) hal. 197-198.

¹⁰ Alfian, dalam Achmad.F.Saifudin, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1986) hal. 17.

¹¹ Eep Saefullah Fatah, *Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi, Sebuah Penajagan Teoritis*, Prisma, No. 8 Thn. XXXIII, Agustus 1994.

¹² Jurnal Wacana Edisi 18. Tahun VI/2004 (Yogyakarta : INSIST Press, 2004) hal. 2007.

Dalam proses demokrasi juga tidak terlepas dari pengelolaan konflik, maka ada dua kemungkinan, sistem politik mengarah pada konsensus atau tetap kembali mempraktekkan watak otoriter dan totaliter. Akhirnya, dibutuhkan kemampuan mengelola konflik untuk menghasilkan efektivitas tinggi, yakni konflik diresolusikan menjadi konsensus. Karena suksesnya demokrasi di negeri ini, tidak hanya tergantung pada pelaksanaan pemilihan Umum, namun lebih ditentukan oleh kegiatan pasca pemilihan Umum yang merupakan ujian bagi demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahrendorf Ralf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri : Sebuah Analisa Kritik*, terjemahan, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Fatah, Eep Saefullah, *Manajemen Konflik Politik dan Demokrasi, Sebuah Penjajagan Teoritis*, Prisma, No. 8 Thn. XXXXIII, Jakarta, Agustus 1994.
- Hidayat, Komaruddin, *Politik Panjat Pinang : Di Mana Peran Agama?*, Kompas, Jakarta, 2006.
- Haris, Syamsuddin (ed.), *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi Indonesia*, LIPI, Jakarta, 2007.
- Nugroho, Heru, *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Setiawan, Bambang dan Bestian Nainggolan (eds.), *Partai-Partai Politik Indonesia : Ideologi dan Program, 2004-2009*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2004.
- Saifuddin, Achmad Fedyani, *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Varma, S. P, *Teori Politik Modern*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.
- Witners, Jeffrey A, *Oligarki*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- DEMOS, *Blok Politik Demokratik*, Panduan Pelatihan, DEMOS Lembaga Kajian Demokrasi & Hak Asasi, Jakarta, 2009.
- Jurnal Wacana, Edisi 18. tahunVI/2004, INSIST Press, Yogyakarta, 2004.